

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana masyarakat berfungsi secara politis. Pendidikan politik melibatkan pemahaman mengenai proses politik, isu-isu politik, hak-hak warga negara, partisipasi dalam sistem politik dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik menjadikan seseorang lebih memahami materi-materi dasar yang diperlukan dalam menjadikan individu yang aktif dalam menyikapi isu-isu politik, mempertimbangkan kembali argumen yang relevan dan menentukan langkah yang tepat (Sandika, 2018).

Dengan adanya pendidikan politik dapat membantu masyarakat dalam memajukan kemampuan dalam berpikir secara kritis agar informasi politik yang diperoleh pada era digital yang kompleks. Pendidikan politik memberikan edukasi mengenai hak-hak masyarakat dalam bernegara. Pendidikan politik dapat dipelajari dimanapun dan kapanpun baik dalam media sosial, media pembelajaran (mata kuliah), seminar pendidikan politik dan tanpa disadari juga Pendidikan politik sering kita temui pada perbincangan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan politik memiliki peran yang semakin penting dengan membentuk masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses politik (Nana & Abdul, 2019).

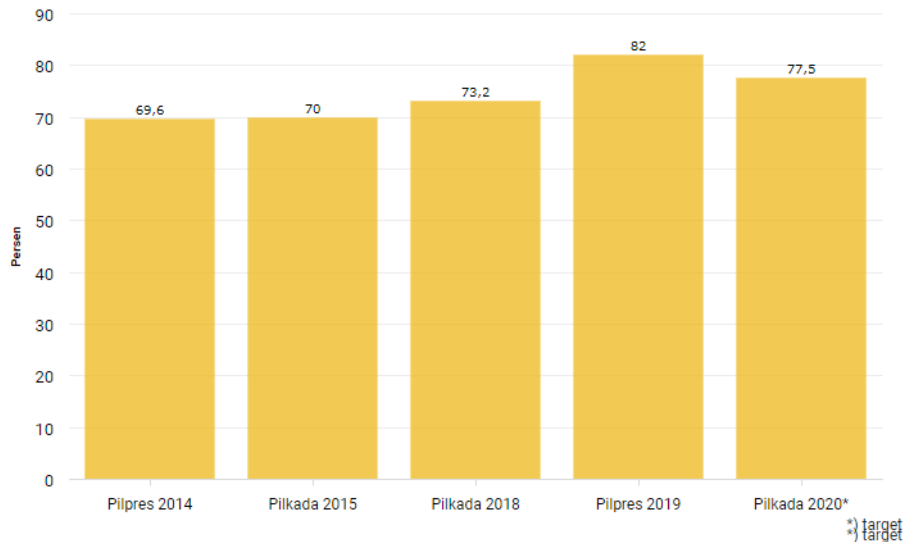
Pendidikan politik yang efektif harus ditujukan kepada mereka agar dapat memperoleh pemahaman politik secara integratif. Artinya, ini mencakup usaha untuk memberikan Pendidikan politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan Pendidikan politik kepada generasi muda merupakan bagian dari Upaya membangun bangsa. Generasi muda sebagai populasi terbesar dalam masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam Pendidikan politik

karena merekalah nanti yang akan berperan penting dalam kemajuan bangsa.

Dari penjelasan pendidikan politik diatas, tentu juga berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang dalam mengikuti kegiatan politik. Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi dikarenakan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik di negara demokrasi menjadi indikator keberhasilan kualitas sistem demokrasi. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi salah satu contoh keterlibatan partisipasi politik ialah dengan adanya kegiatan pemilihan umum yang menggambarkan proses demokratis dalam memilih wakil rakyat secara langsung oleh masyarakat Indonesia yang diadakan setiap lima tahun sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan hak suara masyarakat, mengikuti rapat umum, dan lain sebagainya (Arifin, 2018).

Proses politik yang berjalan dengan lancar maka akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik. Pemilihan umum sebagai bagian penting dari partisipasi politik mempunyai dampak besar pada struktur politik dan arah kebijakan suatu negara. Ini adalah momen dimana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil rakyat dalam Lembaga pemerintahan dan hasilnya sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diimplementasikan (Atiyatunnajah, 2023). Adapun rekapitulasi partisipasi politik masyarakat Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan umum pilpres dan pilkada selama 5 tahun terakhir ialah sebagai berikut:

Sumber: *databoks.katadata.co.id*.



Gambar 1. 1 *Tingkat Partisipasi Politik Pemilu Pilpres dan Pilkada selama 5 Tahun Terakhir*

Dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa setiap tahun pelaksanaan pemilihan umum mengalami peningkatan dalam partisipasi politik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan angka partisipasi politik karena pandemi Covid-19 yang salah satunya melanda negara Indonesia. Pada saat itu kejelasan protokol Kesehatan belum ada pada pelaksanaan pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, hak suara masyarakat tidak digunakan dalam pemilihan dan pada akhirnya mengalami penurunan sebesar 4,5%. Dilihat dari hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden sebesar 82,57%, sedangkan pemilihan legislatif sebesar 78,27%.

Berdasarkan data dari CSIS menyebutkan bahwa partisipasi politik pemilih pemuda pada Tingkat populasi pemilu terjadi perubahan demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pemilih pemuda yang dalam hal ini mahasiswa dalam rentang umur 17-23 tahun. CSIS mengatakan bahwa jumlah pemilih muda dalam pemilu nanti akan mendekati 60% dari total

pemilih. Jika dikonversi, jumlah pemilih muda bisa mencapai sekitar 114 juta orang.

Pemilu merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam masa jabatan kekuasaan tertentu. Secara hukum, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah diatur dengan kerangka hukum yang jelas. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu harus mematuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu sebagai media demokrasi memiliki pedoman yang didasarkan pada asas LUBERJURDIL (Wiwin & Alvian, 2022).

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Jember

No.	Tahapan Jadwal Pemilihan Umum	Waktu
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
2.	Penyusunan peraturan KPU	14 Juni - 14 Desember 2023
3.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023
4.	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	29 Juli 2022 - 13 Desember 2022
5.	Penetapan peserta pemilu	4 Desember 2022
6.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023
7.	Pencalonan anggota DPD	6 Desember 2022 - 25 November 2023

8.	Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	24 April 2023 - 25 November 2023
9.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023 - 25 November 2023
10.	Masa kampanye Pemilu	28 November 2023 - 10 Februari 2024
11.	Masa tenang	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024
12.	Pemungutan suara	14 Februari 2024
13.	Penghitungan suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024
14.	Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024
15.	Penetapan hasil Pemilu	paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK
16.	Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD	1 Oktober 2024
17.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024

Tabel 1. 1 Tahapan Jadwal Pemilihan Umum 2024

Informasi diatas merupakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang telah resmi disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Nomor 3 tahun 2022 dari Komisi Pemilihan Umum. Dengan keluarnya peraturan peraturan ini, dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak akan menunda Pemilu 2024. Peraturan ini sekaligus menjawab berbagai kontroversi yang muncul di media cetak, elektronik, dan media sosial yang banyak memperbingkan isu penundaan Pemilu 2024. Dengan demikian, pada penelitian ini akan membahas tentang pemilu 2024 yang mana pemilihan umum ini dibatasi sampai pada tahapan pemungutan suara.

Dalam menjalankan proses Pendidikan politik dan partisipasi politik menjadi kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat merupakan keseluruhan dari hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert M. Mcleaver mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang teratur (*Society means a system of ordered relations*) (Maclver, 1961). Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat karena mereka adalah agen perubahan masa depan yang akan membentuk wajah baru suatu negara, adanya partisipasi mahasiswa karena terdapat dorongan yang kuat terhadap lingkungan politik (Djumadin, 2021). Mahasiswa cenderung tertarik dengan masalah kebangsaan. Hal tersebut menjadikan Pendidikan politik menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebagai bekal pengetahuan. Tingkat Pendidikan politik yang diterima sudah cukup baik. Diantaranya mencakup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi kewajiban dari kurikulum perguruan tinggi, sumber informasi politik yang akses melalui media dan komunikasi, serta pembelajaran tentang aspek sosial politik yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa (Pratama, 2020).

Mahasiswa berperan menjadi pembela hak warga negara dan memiliki solusi yang ditawarkan dalam permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, cara yang digunakan dengan ikutserta dalam kegiatan politik dan Pendidikan politik yang telah dipahami oleh mahasiswa menjadi hal yang penting. Dapat dilihat mahasiswa ikutserta dalam partisipasi politik yang mana kegiatan tersebut mengarah kepada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang menguntungkan untuk masyarakat lainnya. Maka demikian, mahasiswa menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi atau aksi-aksi sosial yang bertujuan untuk menolak kebijakan baru yang tidak sesuai dan dapat merugikan masyarakat banyak.

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial saat menjalani kehidupan bermasyarakat dan mampu merasakan kesulitan dari masyarakat

yang mereka wakili kepentingannya yang jelas-jelas tertindas dan dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan menggunakan argumentasi ideologis untuk menghasilkan perubahan dalam sistem politik yang ada.

Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang politik praktis merupakan salah satu masalah utama yang dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu. Meskipun mahasiswa mendapatkan Pendidikan politik di lingkungan kampus, materi yang mereka pelajari sering kali bersifat teoritis dan tidak seluruhnya mencakup dinamika politik praktis yang terjadi di lapangan. Banyak mahasiswa merasa kesulitan dalam mengaitkan Pendidikan politik yang didapatkan dengan situasi politik sehari-hari. Selain itu, banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori politik dalam kegiatan politik secara nyata, seperti simulasi pemilu, forum diskusi yang mendalam atau kegiatan politik kampus. Kurangnya partisipasi ini membuat mahasiswa merasa bahwa dunia politik adalah sesuatu yang jauh dari keseharian mereka sehingga kurangnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Dengan kurangnya pemahaman tersebut ditambah dengan sikap apatisisme mahasiswa terhadap sistem politik dan proses pemilu. Banyak mahasiswa merasa bahwa keterlibatan mereka dalam pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Mereka melihat bahwa pemilu hanya memberikan peluang bagi para elit politik untuk memperebutkan kekuasaan, tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, berbagai kasus korupsi dan skandal politik yang terjadi di Indonesia menambah ketidakpercayaan mahasiswa terhadap integritas proses politik. Hal ini menyebabkan mereka merasa pesimis dan meragukan bahwa pemilu bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sikap apatis ini membuat Sebagian mahasiswa untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik, termasuk dalam proses pemilu karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan memberikan dampak yang signifikan.

Penyebab dari partisipasi politik yang rendah walaupun Pendidikan politik yang diterima sudah cukup tinggi dikarenakan rata-rata mahasiswa sudah menyadari pentingnya untuk memilih calon kandidat tetapi banyak hambatan yang membuat partisipasi mereka menurun. Diantaranya adalah kekecewaan terhadap para kandidat yang sering kali tidak memenuhi visi dan misi yang mereka kampanyekan dengan setelah mereka telah terpilih. Selain itu, banyaknya berita politik negatif yang terjadi dari para aktor politik seperti korupsi, pelanggaran HAM dan kekerasan seksual sehingga munculnya rasa ketidakpercayaan mahasiswa pada calon presiden dan anggota legislatif semakin memperburuk keadaan. Maraknya nepotisme juga membuat mahasiswa yang memiliki Pendidikan dan wawasan yang cukup tinggi merasa terhambat karena bukan bagian dari kelompok yang berkuasa. Hal seperti ini membuat mahasiswa cenderung menjadi apatis dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Lembaga Pendidikan memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk karakter anak bangsa. Institusi Pendidikan secara langsung mengindoktrinasi dan memaksa siswanya untuk patuh dan menaati peraturan yang telah ditetapkan (Abowitz & Mamlok, 2020). Melalui wawancara nonsistematis, Data yang didapatkan dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung bahwa pada semester awal mereka dibekali Pendidikan politik dari mata kuliah di jurusan masing-masing seperti Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Dasar-dasar Ilmu Politik dan juga seminar politik. Selain dari mata kuliah, mahasiswa juga mendapatkan Pendidikan politik pada media sosial, organisasi mahasiswa yang diikuti dan kegiatan politik lainnya seperti kampanye politik. Pendidikan politik pada mata kuliah di perguruan tinggi sangat penting karena Pendidikan politik membantu meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran sosial mahasiswa. Dengan begitu, mereka dapat memahami lebih dalam fungsi dan perannya pada kehidupan bermasyarakat dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Maka dari itu, peneliti tertarik memilih Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung karena banyak yang menyebutkan bahwa

politik kampus yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan miniatur politik Indonesia dengan sistem politik yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang mana dengan adanya labelisasi tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Pendidikan politik mahasiswa dapat berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain itu, masih adanya keterbatasan literatur mengenai bagaimana Pendidikan politik yang diperoleh secara formal di kampus berpengaruh kepada partisipasi politik mahasiswa pada pemilu. Pemilu 2024 menjadi momen yang penting karena dinamika politik nasional terus berkembang dan ada perubahan besar dalam strategi kampanye. Penelitian ini penting untuk melihat apakah Pendidikan politik di kampus mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan politik atau apakah masih kurang efektif dalam mendorong partisipasi politik yang aktif dan kritis.

Berdasarkan persoalan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana tingkat partisipasi politik mahasiswa, khususnya UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Pemilu 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Pendidikan politik yang efektif dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya peran mahasiswa dalam proses demokrasi, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu politik yang relevan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pemilu terhadap kehidupan sehari-hari, mahasiswa seharusnya lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.

Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati pada pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

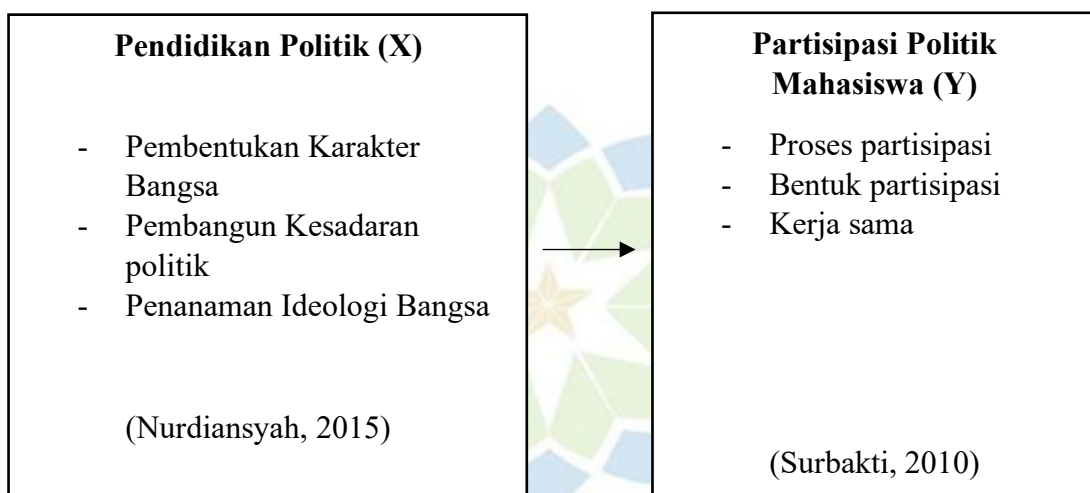
Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Politik terhadap partisipasi politik Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati pada pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dalam bidang sosial politik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian yang lebih baru dan lebih sempurna mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap Tingkat partisipasi politik mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Menjadi bahan kajian evaluasi dalam meningkatkan angka partisipasi politik mahasiswa.
 - b. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan yang diterapkan dalam karya ilmiah.
 - c. Bagi Pembaca
Penelitian ini tentunya dapat menambah referensi bacaan dan wawasan informasi yang bagus dalam bentuk yang nyata.

1.5 Kerangka Berpikir

Pendidikan Politik membawa peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik, karena melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara serta isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, individu menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Berkaitan dengan itu, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagaimana gambar dibawah ini.



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

Berdasar dari gambar di atas menunjukkan bahwa Partisipasi politik menekankan tingkat pengetahuan dan kesadaran politik individu yang diperoleh melalui Pendidikan politik yang membawa peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan politik memberikan mahasiswa banyak pemahaman mengenai sistem pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta isu-isu politik terkini. Dari pemahaman ini, mahasiswa diharapkan dapat terdorong dan memiliki rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilu. Semakin tinggi kualitas Pendidikan politik yang diterima mahasiswa, semakin tinggi juga Tingkat partisipasi politik mahasiswa pada pemilu tahun 2024, baik sebagai pemilih maupun dalam bentuk keterlibatan politik lainnya.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan, bentuk rumusan masalah yang digunakan adalah rumusan masalah hubungan (*assosiatif*). Menurut Sugiyono yang menjelaskan bentuk assosiatif adalah bentuk jawaban sementara yang menjelaskan tentang hubungan dua atau lebih variabel. Berdasarkan dari kerangka penelitian dan pernyataan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0):

Tidak adanya Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Pemilu 2024

2. Hipotesis Alternatif (H_a):

Adanya Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada Pemilu 2024

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini dipilih untuk dijadikan sebagai acuan, pembandingan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang diperoleh untuk saat ini. Tinjauan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Sintia Lisnawati (2022) dengan judul “Pengaruh Pendidikan politik terhadap tingkat partisipasi politik peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipasi (SKPP) di Kabupaten Bandung”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Pendidikan politik dan Tingkat partisipasi politik peserta SKPP di Kabupaten Bandung yang mana SKPP tersebut bagian dari Pendidikan politik yang diadakan oleh Bawaslu. Pendidikan politik dapat memberikan sebuah pengetahuan baru dan

diterapkan oleh peserta SKPP setelah mengikuti kegiatan Pendidikan politik. Terhitung dari tahun 2018-2020 di Kabupaten Bandung terdapat sebanyak 195 peserta yang telah mengikuti kegiatan SKPP dan ikutserta dalam Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020. Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh SKPP terhadap partisipasi politik pada pilkada tahun 2020 di kabupaten Bandung dan tujuannya untuk mengetahui dari pengaruh antara Pendidikan politik pada Tingkat partisipasi politik peserta SKPP pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah teori dari Pendidikan politik dan partisipasi politik. Penelitian ini memiliki perbedaan dari populasi penelitian ini ialah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dan pada penelitian yang akan dilakukan populasi yang akan diteliti yaitu Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perbedaan selanjutnya dari tahun penelitian yang mengalami pembaruan dan penelitian yang akan diteliti mengambil fenomena politik yaitu pemilu 2024. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kajian yang akan dibahas mengenai Pendidikan politik terhadap Tingkat partisipasi politik. Hasil dari penelitian Sintia Lisnawati bahwa Pendidikan politik memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai sig (signifikansi) dari variabel Pendidikan politik (X) sebesar 0.000. nilai ini berada dibawah nilai 0,05 ($<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendidikan politik mempunyai pengaruh cukup besar terhadap partisipasi politik. Berdasarkan besarnya angka Koefisien Determinasi sebesar 0,376 atau sebesar 37,6% partisipasi politik (Y) yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan politik (X).

Kedua, penelitian Cecep Nana Nasuha dan Cecep Abdul Malik dengan judul “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan)”. Pendidikan politik yang dibentuk adalah Pendidikan politik menurut kartono yang mana memiliki 3 indikator, yaitu kesadaran masalah, Dialog politik dan pemecahan masalah. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendidikan politik masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap partisipasi politik dalam pilkada bupati di Kabupaten Kuningan. Teori yang digunakan adalah teori yang dibangun dari analisis Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa pengaruh Pendidikan politik terhadap partisipasi politik dalam pilkada di Kabupaten Kuningan secara keseluruhan memiliki Tingkat partisipasi yang rendah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah cakupan partisipasi politik yang mana pada penelitian terdahulu mencakup partisipasi kabupaten kuningan sedangkan penelitian yang akan diteliti mencakup partisipasi politik mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ketiga, Penelitian Novia Santiya Sari yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di SMA Kecamatan Bantul”. Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendidikan politik terhadap Tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019 di SMA Kecamatan Bantul dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh Pendidikan politik terhadap Tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019 di SMA Kecamatan Bantul. Persamaan dari penelitian ini ialah dari variabel penelitian, fenomena politik yaitu pemilihan umum dan metode penelitian yang diambil yaitu kuantitatif dengan Teknik *Simple Random Sampling*. Perbedaan dari penelitian terdahulu dari novia dan penelitian ini adalah waktu pemilu yang dipilih, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada saat pemilu 2019 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada saat pemilu 2024. Penelitian terdahulu mengambil populasi di SMA Kecamatan Bantul sedangkan penelitian ini mengambil populasi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Landasan teori dari penelitian Novia menggunakan teori Pendidikan politik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendidikan

politik dengan partisipasi politik pemilih pemula di SMA Kecamatan Bantul sebesar 60,3%.

Keempat, Penelitian Dwira Kharisma yang berjudul “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemuda” pada penelitian ini, pokok masalahnya ialah bagaimana peran Pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda dalam pemilihan anggota Legislatif Kota Manado pada Tahun 2014 dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pendidikan politik dalam mempengaruhi bentuk, motivasi dan variasi partisipasi politik yang dilakukan pemilih muda yang ada di Kota Manado pada masa pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 lalu. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan juga terdapat perbedaan pada segi variabel. Persamaan pada penelitian ini pada teori yang digunakan yaitu Pendidikan politik dan partisipasi politik. Pada penelitian ini, penelitian terdahulu menggunakan teori dari Maran (2001). Hasil penelitian terdahulu dari Dwira bahwa Pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan perannya sebagai sosialisasi politik. Faktanya, pemilih muda bersikap acuh tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014 di Kota Manado.

Kelima, Penelitian dari Ni Ketut Arniti dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar”. Fokus penelitian ini ialah pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar pada tahun 2014. Pokok masalahnya mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif di kota Denpasar Periode 2014-2019. Serta tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui peran serta politik masyarakat dalam pemilu legislatif kota Denpasar Periode 2014-2019. Penelitian yang ditulis oleh Ni Ketut Arniti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dan

kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah respon masyarakat di kota Denpasar dalam mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 memiliki antusias yang tinggi dalam partisipasi politik dan menjadikan Tingkat partisipasi di Denpasar menjadi tinggi. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah dari populasi dan tempat penelitian yang mana populasi dari penelitian terdahulu kepada masyarakat Denpasar dan tempat penelitian yang dilakukan di kota Denpasar, sedangkan penelitian ini populasi penelitiannya tertuju kepada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan tempat penelitian yang diambil ialah kota Bandung. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang mana variabel yang digunakan dengan sama-sama menggunakan partisipasi politik pada pemilihan umum. Persamaan lainnya ialah dari metode yang menggunakan metode kuantitatif

